

## Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

Ari Yunaida <sup>1\*</sup>, Angga Wiranata <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia  
[ariyunaida1195@gmail.com](mailto:ariyunaida1195@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [anggawiranata55@gmail.com](mailto:anggawiranata55@gmail.com) <sup>2</sup>

Alamat: Jl. Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124

Korespondensi penulis: [ariyunaida1195@gmail.com](mailto:ariyunaida1195@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of fiscal decentralization financing sources on poverty levels. This study covers areas in Jambi Province using secondary time series data for the period 2007-2016. This study uses Multiple Regression Analysis. Fiscal decentralization financing sources of local revenue and balancing funds do not have a significant positive effect on poverty levels in Jambi Province, while other legitimate incomes have a positive and significant effect in Jambi Province from 2007-2016. The effect of fiscal decentralization financing sources (PAD, DP, PL) on poverty levels in Jambi Province is 80.2%, while the remaining 19.8% is influenced by other factors not included in this study. And there is a strong relationship between fiscal decentralization and poverty levels of 89.6%.*

**Keywords:** *Decentralization, PAD, Poverty*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini memiliki cakupan daerah di Provinsi Jambi yang menggunakan data sekunder runtun waktu (time series) periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Sumber pembiayaan desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di Provinsi Jambi dari tahun 2007-2016. Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal (PAD, DP, PL) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 80,2%, Sedangkan sisanya 19,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan terdapat hubungan yang kuat antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan sebesar 89,6%.

**Kata kunci:** Desentralisasi, PAD, Kemiskinan

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur (Yoriska, Y., 2020). Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah (REZA, M., 2014). Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi (Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M., 2019). Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan (Prayitna, R. G. I., 2018). Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

**Tabel 1.** Jumlah penduduk Miskin diprovinsi Jambi (Persentase Jumlah Penduduk Miskin) Provinsi Jambi Tahun 2007-2016

<b>Tahun</b>	<b>Persentase jumlah penduduk miskin (%)</b>
2007	15,14
2008	13,28
2009	12,71
2010	11,80
2011	11,19
2012	10,53
2013	10,41
2014	10,67
2015	12,11
2016	10,73

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di provinsi Jambi mengalami fluktuasi sejak tahun 2007 sampai tahun 2016. Pada tahun 2007 persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 15,42%, angka tersebut cukup tinggi walaupun lebih rendah dari angka kemiskinan nasional sebesar 16,58%. Disusul pada tahun 2008 sebesar 13,28%, lalu menurun setiap tahunnya hingga tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2013

menjadi 10,41%, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 10,67%, dan pada tahun 2015 menjadi 12,11%.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah keseluruhan aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan (Basit Fauzi Nugraha, A., 2012). Aspek pemerintahan yang dimaksud disini adalah aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pada aspek ini masalah yang ditimbulkan adalah tuntutan otonomi yang sangat besar yang harus diberikan kepada daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang strategis bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Arifin, S., 2007).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Desentralisasi fiskal memberi ekstensi kebebasan berinovasi dan berkreasi kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perannya sebagai pelaksana fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya. Kaitan desentralisasi fiskal dengan kemiskinan dapat dijelaskan dari beberapa teori bahwa desentralisasi fiskal membuat pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi dan preferensi kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang terpusat agar tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat (Ridwan, A., Syaparuddin, S., & Mustika, C., 2017)..

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi dalam mengurangi persentase jumlah penduduk miskin, yaitu Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi di Provinsi Jambi Tahun 2007 – 2016).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut

:“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat (Nurhayati, N., 2017). Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah khususnya dalam pengadaan keuangan daerah sehingga penyediaannya dapat diusahakan seoptimal mungkin mengingat daerah dituntut untuk bisamandiri, baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya maupun dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Hutagalung, E., 2016). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab. 2) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD. 3) Daerah dapat membentuk dana cadangan. 4) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain. 5) Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD (Hasyim, M., 2021). Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan. Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004).

### **Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak, pembentukan dewan yang dipilih oleh rakyat dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Suwandi, A. P., 2013).

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat pemerintah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Hastuti, P., 2018). Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga berimbas pada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

### **Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal**

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dana Perimbangan (X2)**

Menurut undang – undang No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingatkan tujuan masing-masing jenis pendapatan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

### **Pendapatan Lain-Lain yang Sah (X3)**

Yang termasuk dana pendapatan lain-lain yang sah adalah dana yang berasal dari sumber lain selain pendapatan asli daerah ataupun dana perimbangan. Pendapatan ini berasal dari sumbangan atau hibah dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar kesukarelaan dan persetujuan dari semua pihak. Berikut ini yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang sah, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. Penerimaan bagi hasil dari provinsi
- c. Dana perimbangan kabupaten dari provinsi
- d. Bantuan kepada daerah dari penyisihan PBB bagian provinsi
- e. Bantuan kepada daerah dari penyisihan pajak dan retribusi provinsi
- f. Sewa tanah dan bangunan
- g. Pendapatan dari daerah lainnya
- h. Pendapatan lainnya

### **Tingkat Kemiskinan (Y)**

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang

dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki cakupan daerah di Provinsi Jambi yang menggunakan data sekunder runtun waktu (time series) periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda.

#### Uji Hipotesis

##### Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F-statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan f-tabel. Jika  $F_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

##### Uji Secara Parsial (Uji t)

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti bahwa secara individu variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ )

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 2.** Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	276495.291	8793.830		31.442	.000
	X1	-4.774E-10	.000	-.443	-2.172	.073
	X2	-2.017E-8	.000	-.636	-1.795	.123
	X3	8.746E-8	.000	1.154	3.420	.014

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSS 23

**Model Regresi**

$$Y = 276495.291 - 4.774X_1 - 2.017X_2 + 8.746X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, tingkat kemiskinan menjelaskan bahwa konstanta/intersep sebesar 276495.291 berarti apabila variabel PAD, DP, PL tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan berarti tingkat kemiskinan akan meningkat sebanyak 276495.291 %.

- a. Nilai koefisien dari PAD sebesar -4.774 menjelaskan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 4.774%.
- b. Nilai koefisien dari DP sebesar -2.017 menjelaskan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 2.017 %.
- c. Nilai koefisien dari PL sebesar 8.746 menjelaskan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 8.746 %.

**Uji Secara Simultan (Uji F)**

**Tabel 3.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2238470878.744	3	746156959.581	8.105	.016 <sup>b</sup>
	Residual	552365583.356	6	92060930.559		
	Total	2790836462.100	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data diolah, SPSS 23

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh PAD, DP dan PL secara simultan terhadap TK adalah sebesar  $0,016 < 0,05$  dan nilai  $f\text{-hitung } 8.105 > 4.35$ , sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Pendapatan Lain-lain yang sah (PL) secara simultan terhadap TK.

**Uji Secara Parsial (Uji t)**

**Tabel 4.** Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	276495.291	8793.830		31.442	.000
	X1	-4.774E-10	.000	-.443	-2.172	.073
	X2	-2.017E-8	.000	-.636	-1.795	.123
	X3	8.746E-8	.000	1.154	3.420	.014

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, SPSS 23



**Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)**

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat kemiskinan adalah sebesar  $0.073 > 0.05$  dan nilai t-hitung  $-2.174 < t\text{-tabel } 2.447$ , sehingga hipotesis ditolak. Ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tersapat pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi.

**Dana Perimbangan (DP) (X2)**

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel Dana Perimbangan (DP) terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) adalah sebesar  $0.123 > 0.05$  dan nilai t-hitung  $-1.795 > t\text{-tabel } 2.447$ , sehingga hipotesis ditolak. Ditarik kesimpulan Dana Perimbangan (DP) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi.

**Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PL) (X3)**

Uji signifikansi yang dilakukan pada variabel Pendapatan Lain-lain yang sah (PL) adalah sebesar  $0.014 < 0.05$  dan nilai t-hitung  $3.420 > t\text{-tabel } 2.447$ , sehingga hipotesis diterima. Ditarik kesimpulan Pendapatan Lain-lain yang sah (PL) berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi.

**Koefisien Determinasi****Tabel 5.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896 <sup>a</sup>	.802	.703	9594.83875

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data diolah, SPSS 23

Hasil R<sup>2</sup> untuk variabel dependen jumlah penduduk miskin dengan menggunakan SPSS 23 diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal (PAD, DP dan PL) sebesar 80,2%, sedangkan sisanya sebesar 19,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan nilai korelasinya diperoleh 89,6% yang berarti hubungan antar variabel kuat.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Sumber pembiayaan desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan di Provinsi Jambi dari tahun 2007-2016. Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal (PAD, DP, PL) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 80,2%, Sedangkan sisanya 19.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan terdapat hubungan yang kuat antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan sebesar 89,6%.

### **Saran**

Variabel independen dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penerimaan daerah diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel pengeluaran daerahnya dan diharapkan juga adanya kajian dengan membandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini sudah menggunakan data yang terbaru, diharapkan untuk studi selanjutnya digunakan periode dan data yang lebih terbaru.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Arifin, S. (2007). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Membangun Ekonomi untuk Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 4(2).
- Basit Fauzi Nugraha, A. (2012). Tinjauan Atas Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pada Bagian Akuntansi Dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784-799.
- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95-106.
- Hierdawati, T., & Dani, R. (2023, November). Factors That Influence Palm Oil Farmers' Income. In *Proceeding of The International Conference on Business and Economics* (Vol. 1, No. 2, pp. 200-211).
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1-1.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis teori transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2).
- Prayitna, R. G. I. (2018). *Evaluasi program keluarga harapan dalam meningkatkan keberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan kesehatan* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- REZA, M. (2014). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).

- Ridwan, A., Syaparuddin, S., & Mustika, C. (2017). Pengaruh sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat kemiskinan (Studi di kabupaten-Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 87-99.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 2.
- Suwandi, A. P. (2013). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98-111.